

Bab II

Kajian Pustaka

2.1 Latar Belakang Aristotle

Nama Aristotle sendiri sudah sangat terkenal dalam dunia filsafat. Aristotle bersama dengan gurunya yakni Plato merupakan generasi filsuf Yunani era Socratic yang dapat dikatakan sebagai penyempurnaan terakhir tradisi filsafat Yunani yang telah berlangsung dari era awal filsafat Yunani yang dimulai oleh para *Seven Sages* / Tujuh Orang Bijak yaitu Thales, Pittacus, Bias, Solon, Cleobulus, dan Chilon.⁵

Aristotle sendiri lahir pada tahun 384 SM di Stagira, Halkidiki. Ayahnya yaitu Nikomachus merupakan dokter personal Raja Amyntas dari Makedonia. Dari kecil, Aristotle belajar tentang biologi dan informasi – informasi medis yang diajarkan oleh ayahnya. Kedua orang tua Aristotle meninggal ketika dia berumur kira – kira tiga belas tahun, dan setelah itu Proxenus dari Atarneus menjadi orang tua walinya.

Pada umur sekitar tujuh belas sampai delapan belas tahun, Aristotle pindah ke Athena dan melanjutkan pendidikannya pada Akademi yang didirikan oleh Plato. Aristotle menetap di Athena hampir 20 tahun sebelum meninggalkan Athena sekitar tahun 348/347 SM. Kisah tradisional yang berderedar menjelaskan kalau dia meninggalkan Athena karena kecewa dengan arah akademi dibawa setelah kepemimpinan akademi dipindahkan dari Plato ke saudara sepupunya Speusippos.

⁵ Bertens, Kees. 1999. Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta. Penerbit Kanisius

Pada tahun 343 SM, Aristotle diundang oleh Philip II dari Makedonia untuk menjadi guru bagi anaknya Alexander.

Alexander sendiri nantinya menjadi Raja Makedonia yang berhasil melakukan ekspedisi militer yang pada akhirnya membuat Makedonia menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah dimana luas kekuasaannya mencakup dari Yunani Barat Laut India.

Aristotle sendiri adalah seorang filsuf realis seperti kebanyakan filsuf Yunani lainnya. Filsafat realis sendiri merupakan aliran filsafat yang memiliki posisi bahwa realitas objektif / kebenaran sudah ada secara independen di luar manusia. Dalam Realisme, yang perlu dilakukan oleh manusia adalah menemukan kebenaran beserta prinsip – prinsipnya yang sudah ada di dunia. Bagi para realis, kebenaran bersifat objektif terlepas dari persepsi setiap individu. Maka dari itu, paham relativisme yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran absolut melainkan kebenaran bersifat subjektif ditolak oleh filsafat realisme. Maka dari itu dalam perkembangannya, filsafat realis di era Plato dan Aristotle (era Sokratik) akhirnya mengembangkan *Socratic Method* yang merupakan sebuah metode eliminasi hipotesa yang digunakan untuk mengeliminasi hipotesa – hipotesa yang mengarah pada kontradiksi.

2.2 Teori Politik Aristotle

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politika* memuat delapan bagian yang masing – masing menjelaskan tentang pemahaman politik yang ia miliki.

Di dalam buku pertama, Aristotle mendiskusikan tentang komunitas politik yang bisa juga disebut sebagai *Polis*. *Polis* sendiri memiliki perbedaan dengan tipe komunitas atau persekutuan lain seperti Rumah tangga dan desa. Menurut Aristotle, bentuk tertinggi dari sebuah komunitas adalah *Polis*. Aristotle mengambil kesimpulan seperti ini karena menurutnya kehidupan publik jauh lebih berbudi luhur dibandingkan kehidupan privat karena menurutnya manusia adalah hewan politik / *Zoon Politikon*. Aristotle memulai di awal dengan membahas relasi antara kota dan manusia, dan berikutnya secara spesifik mendiskusikan terkait rumah tangga.⁶

Aristotle membahas terkait pandangan bahwa kekuasaan politik, kekuasaan raja, kekuasaan atas budak, dan kekuasaan atas rumah tangga atau desa hanya berbeda pada ukuran. Dia kemudian meneliti terkait dalam hal apa sebuah kota dapat dikatakan natural.

Aristotle mendiskusikan bagian2 dari rumah tangga, yang di situ termasuk budak, mengarah pada diskusi apakah perbudakan dapat dibenarkan dan baik bagi orang yang diperbudak atau akan selalu tidak benar dan buruk. Aristotele membedakan antara mereka yang menjadi budak karena hukum/politis dan mereka yang menjadi budak karena kondisi alamiah.

Aristoteles kemudian beralih pada pembahasan terkait properti secara umum, mengargumentasikan bahwa akuisisi properti tidak termasuk dalam manajemen rumah tangga, dan mengkritisi siapa saja yang terlalu berlebihan dalam aktivitas

⁶ Aristoteles, 2022. Politics. Yogyakarta : Penerbit Indoliterasi

akuisisi properti. Akuisisi properti memang diperlukan, tapi hal itu tidak serta merta membuat akuisisi properti menjadi bagian dari manajemen rumah tangga sama halnya pengobatan tidak menjadi bagian dari manajemen rumah tangga hanya karena kesehatan sangat diperlukan.

Aristotle mengkritisi pendapatan finansial yang berasal dari perdagangan dan bunga. Hal ini karena menurut Aristotle, mereka yang menjadi tamak melakukan praktik bunga dikarenakan mereka lupa bahwa uang hanya menyimbolkan kekayaan tanpa menjadi kekayaan itu sendiri dan prakti bunga adalah bertentangan dengan alam karena bunga berusaha memperanakan uang yang steril.

Buku ke satu menyimpulkan pernyataan yang tegas dari Aristotle bahwa tujuan yang tepat dari pengaturan rumah tangga adalah membentuk karakter istri dan anak – anak yang berbudi luhur, bukan manajemen budak atau akuisisi properti. Berkuasa atas budak adalah lalim, berkuasa atas anak – anak secara rajawi, dan berkuasa atas istri secara politis. Aristotle mempertanyakan apakah sebuah hal yang bijak untuk mempertanyakan kebajikan seorang budak dan apakah kebajikan seorang istri dan anak – anak adalah sama dengan para budak. Hal ini dikarenakan sebuah kota harus menaruh konsern terhadap perkembangan kebajikan. Kebajikan yang perlu ditanamkan oleh seorang Bapak kepada anggota keluarganya tergantung pada bentuk rezim yang sedang berkuasa, dan maka dari itu diskusi selanjutnya pada buku ke dua Aristoteles membahas terkait bagaimana rezim terbaik.

Buku ke dua dari *Politika* Aristotle memeriksa beragam pandangan terkait rezim yang terbaik. Aristoteles memulai dengan dengan analisa tentang bentuk

rezim yang dijelaskan dalam buku republik yang ditulis oleh Plato, menekankan bahwa kepemilikan komunal atas properti di antara para *Guardian* akan meningkatkan ketimbang mengurangi pertikaian, dan kepemilikan bersama istri dan anak – anak akan menghancurkan afeksi natural. Aristotle menjelaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan akal sehat, dan eksperimen telah membuktikan bahwa hal tersebut tidak praktis. Aristotle selanjutnya menganalisa rezim yang terkandung dalam ajaran hukum plato. Sistem yang di bawa oleh dua filsuf lain yaitu phaleas kalsedonia dan hippodamus miletus juga di analisa oleh aristotle.

Setelah membahas bentuk – bentuk rezim yang dikembangkan oleh para teoritis, aristotle beralih ke pengkajian tiga rezim yang biasa disebut sebagai rezim yang terselenggara dengan baik. Rezim – rezim tersebut adalah Sparta, kreta, kartago. Buku kedua menyimpulkan dengan beberapa observasi terkait bentuk - bentuk rezim dan legislator.

Buku ke tiga dari *politika* aristotle pada bagian awal membahas terkait warga negara. Menurut aristotle, seorang warga negara adalah siapa saja yang dapat mengambil bagian dalam proses pemerintahan. Aristotle melihat bahwa kebanyakan orang di dalam *polis* sanggup untuk menjadi warga negara. Pandangan Aristotle ini berkontradiksi dengan pandangan plato yang menegaskan bahwa hanya sedikit orang saja yang mengambil bagian dalam proses deliberatif atau judisial negara.

Selanjutnya terkait jenis – jenis konstitusi juga dibahas oleh aristotle dalam buku ke tiga. Menurut Aristotle, Konstitusi politik yang baik dapat dibagi menjadi monarki, Aristokrasi, dan *Politeia* (Pemerintahan konstitusional). Monarki adalah pemerintahan di mana satu orang yang menjadi pemimpin tertinggi dan memimpin jalannya pemerintahan. Aristokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh sedikit orang atau kelompok tertentu. Sedangkan *Politeia* adalah pemerintahan yang di mana banyak orang ikut menjalankan pemerintahan tersebut. Untuk *Politeia*, Aristotle menjelaskan bahwa pemerintahan model seperti ini lebih sulit terbentuk di bandingkan monarki dan aristokrasi. Hal ini dikarenakan menemukan satu orang yang berbudi luhur untuk menempati kekuasaan monarki lebih mudah. Dan begitu juga menemukan sekelompok orang yang berbudi luhur juga cukup mudah untuk nantinya ditempatkan sebagai kelompok yang memimpin pemerintahan. Namun untuk menemukan situasi di mana sejumlah besar masyarakat memiliki kualitas budi yang merata sangatlah sulit. Itu lah mengapa menurut aristotle, kelas prajurit pertahanan, yang memiliki senjata, merupakan kelas yang paling memiliki otoritas untuk model konstitusi *politeia*.

Dari ke tiga bentuk konstitusi tersebut, aristotle juga menjelaskan bentuk konstitusi yang merupakan deviasi / korup dari ke tiga bentuk tersebut. Monarki korup menjadi tirani, aristokrasi korup menjadi oligarki, dan *politeia* korup menjadi demokrasi. Tirani adalah kekuasaan oleh satu orang untuk keuntungan sang satu penguasa tersebut, oligarki adalah kekuasaan oleh sekelompok orang kaya yang di mana kekuasaan tersebut di arahkan untuk memberikan keuntungan bagi sekelompok kaya tersebut. Demokrasi adalah kekuasaan oleh kaum miskin untuk

kepentingan kaum miskin. Namun baik tirani, oligarki, dan demokrasi menurut aristotle sama – sama tidak bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Buku ke empat dari *Politika* Aristotle membahas terkait fungsi dan pentingnya ilmu kenegaraan/politik. Ilmu kenegaraan ini menurut Aristotle berfungsi untuk mengetahui terkait apakah konstitusi itu, bagaimana konstitusi dalam sebuah kondisi yang ideal. Untuk berhasil mendapatkan konstitusi yang terbaik, maka ilmu kenegaraan ini menjadi sangat penting. Aristotle juga berpendapat bahwa setiap negarawan perlu untuk memahami ilmu kenegaraan ini agar nantinya mereka dapat menjalankan tugas nya dengan baik.

Buku ke lima dalam *Politika* membahas tentang perubahan konstitusi, revolusi, dsj... Aristotle di sini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada konstitusi sebuah entitas politik disebabkan oleh terciptanya fraksi dalam masyarakat. Fraksi – fraksi dalam masyarakat ini terbentuk karena dipengaruhi oleh kelompok – kelompok yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang diterapkan.

Selanjutnya Aristotle membahas terkait konstitusi campuran dalam buku ke enam. Dia menjelaskan bahwa beberapa jenis konstitusi juga dapat mengalami pencampuran. Konstitusi yang baik pun juga dapat tercampur dengan bentuk konstitusi yang buruk seperti menjadi aristokrasi yang oligarkik, dan *politeia* yang memiliki kecenderungan ke demokrasi.

Dalam dua buku terakhir yaitu buku ke tujuh dan delapan, dijelaskan terkait bagaimana kualitas kehidupan masing – masing individu dalam masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam buku ke tujuh, Aristotle menjelaskan pentingnya setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur / kebajikan. Hidup dengan kebajikan menurut aristotle adalah cara agar warga negara dapat mencapai kebahagiaan hidup. Dalam buku terakhir yaitu buku kedelapan, Aristotle menjelaskan pentingnya pendidikan bagi warga negara. Pendidikan ditujukan untuk menanamkan kebajikan – kebajikan aristokratis kepada warga negara muda.

Pemikiran politik Aristotle sendiri dapat menjadi jawaban bagi permasalahan sosial – ekonomi – politik dunia modern saat ini. Yang pertama dari segi ekonomi – politik, Aristotle memiliki posisi anti terhadap riba / pengenaan bunga(*interest*) pada pinjaman uang. Aristotle menentang praktik riba / bunga pinjaman karena menurut dia riba adalah hal yang bertentangan dengan hukum alam. Uang menurut Aristotle adalah benda artifisial, dan praktik riba berupaya untuk memperanakan uang yang sejatinya merupakan benda artifisial. Maka Riba ini akan menciptakan permasalahan Finansial di tengah masyarakat karena tidak mungkin seluruh masyarakat akan dapat membayar pinjaman plus bunga nya. Alhasil dalam mekanisme riba ini, gagal bayar hutang adalah hal yang tidak dapat dihindari. Mengikuti perinsip Aristotle ini, Riba dalam bentuk bunga pinjaman dapat dihilangkan agar dapat menciptakan iklim ekonomi – politik yang sehat di masyarakat.

Lalu dalam hal sistem politik, Aristotle sendiri merupakan orang yang menyebut bahwa demokrasi adalah sistem politik yang terdegenarsi. Demokrasi

bagi aristotle merupakan bentuk korup dari sistem politik oleh banyak orang yaitu *Politeia* atau negara kota. Demokrasi dalam dunia modern ini juga pun sangat di inspirasi oleh semangat liberalisme. Liberalisme sendiri mengandung sifat rasionalisme di mana menganggap manusia sebagai penentu apa yang benar dan apa yang salah. Maka dari itu dalam demokrasi modern ini, hal – hal yang secara objektif berbahaya seperti ideologi LGBT contohnya, dapat menjadi sesuatu yang benar hanya karena mayoritas masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang benar. Menggunakan prinsip – prinsip filsafat aristotelian, tentunya hal – hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan filsafat aristotle mengakui apa yang disebut sebagai Hukum alam / kodrat sebagai sebuah kebenaran objektif yang tidak bisa di otak – atik oleh manusia. Maka dari itu menggunakan prinsip prinsip aristotelian untuk dijadikan penawar bagi iklim politik dewasa ini yang makin hari makin liberal merupakan langkah yang bijak.

2.3 Teori Oligarki Aristotle

Aristotle kompak bersama dengan gurunya plato memasukan sistem oligarki pada kategori sistem yang bermasalah dan buruk. Oligarki menurut aristotle merupakan versi buruk pemerintahan oleh sedikit orang, yang merupakan lawan dari aristokrasi yang adalah versi baik dari pemerintahan oleh sedikit orang. Pemerintahan oligarki bersama dengan pemerintahan tirani juga merupakan sistem pemerintahan yang cepat mengalami keruntuhan.

Dari Oligarki, salah satu bentuknya adalah mayoritas warga negara memiliki beberapa properti, tapi tidak terlalu banyak; dan ini adalah bentuk pertama, yang

memungkinkan seseorang yang mempunyai properti yang dibutuhkan mendapatkan sejumlah hak untuk mengambil bagian di pemerintah. Pemegang andil dalam pemerintahan terdiri dari banyak badan, dan mengakui kalau hukum yang harus, dan bukan individu. Karena sebanding dengan semakin jauhnya mereka dari bentuk pemerintahan monarki, dan sehubungan dengan kepemilikan properti yang tidak banyak maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk dapat hidup tanpa mengurus bisnis, dan tidak sedikit masih memerlukan biaya hidup dari negara, sehingga harus mengakui peraturan hukum dan tidak mengklaim untuk memerintah sendiri. Tetapi jika orang – orang yang memiliki properti lebih sedikit di suatu negara daripada kasus sebelumnya, dan memiliki lebih banyak properti, maka muncul bentuk oligarki kedua. Semakin kuat mereka, semakin banyak kekuatan yang mereka klaim, oleh karena itu mereka sendiri memilih kelas – kelas lain yang harus diterima dalam pemerintahan; namun kalau belum cukup kuat untuk memerintah tanpa hukum, mereka membuat undang – undang yang mewakili keinginan mereka. Ketika kekuatan ini diintensifkan dengan semakin berkurangnya jumlah dan kenaikan properti mereka, timbul tahap ketiga dan tahap lebih lanjut dari oligarki, di mana kelas yang memerintah menduduki sendiri instansi – instansi, dan undang – undang menahbiskan bahwa anak laki – laki harus menggantikan ayahnya. Ketika sekali lagi para penguasa memiliki banyak kekayaan dan banyak teman, maka kelaliman keluarga semacam ini mendekati monarki; individu yang memerintah dan bukan hukum. Ini adalah jenis oligarki keempat, dan serupa dengan demokrasi tipe terakhir.

Perangkat yang digunakan oleh oligarki untuk mengelabui rakyat ada lima; mereka berhubungan dengan 1) majelis; 2) pejabat publik; 3) pengadilan; 4) kepemilikan senjata; 5) olahraga senam.

1) Majelis dikatakan terbuka untuk semua orang, tapi hanya orang kaya yang didenda karena tidak hadir, atau denda yang jauh lebih besar diberikan kepada mereka. 2) untuk para pejabat, mereka yang memenuhi syarat berdasarkan properti tidak dapat menolak jabatannya di atas sumpah, tapi orang miskin bisa menolak. 3) Di pengadilan, orang kaya, dan orang kaya saja, didenda jika tidak melayani, orang miskin dilepaskan dengan kekebalan hukum, atau, seperti dalam hukum charondas, denda yang lebih besar diberikan kepada orang kaya, dan yang lebih kecil pada orang miskin. Di beberapa negara, semua warga negara yang telah mendaftarkan diri diizinkan untuk menghadiri majelis dan untuk megadili perkara; tetapi jika setelah pendaftaran mereka tidak hadir baik di majelis atau di pengadilan, denda berat akan dikenakan pada mereka. Tujuannya karena takut akan denda, mereka mungkin tidak mendaftarkan diri, dan kemudian mereka tidak dapat duduk di pengadilan hukum atau majelis. Tentang 4) kepemilikan senjata, dan 5) olahraga senam, mereka mengaturnya dengan semangat yang sama. Bagi orang miskin tidak berkewajiban memiliki senjata, namun orang kaya didenda karena tidak memilikinya; dan dengan cara yang sama, tidak ada hukuman yang ditimpakan pada orang miskin karena tidak hadir di gedung olah raga, dan akibatnya, karena tidak ada yang perlu ditakuti, mereka tidak hadir, sedangkan orang kaya dapat dikenai denda, sehingga mereka harus hadir.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai referensi penulis dalam penelitian ini. Selain sebagai referensi, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan pembandingan, pedoman maupun bahan koreksi penulis. Kedepannya penulis dalam penelitian ini akan belajar bagaimana kekurangan maupun kelebihan penelitian terdahulu sehingga penulis akan lebih berhati-hati. Maka penelitian terdahulu sangat berperan sebagai bahan masukan dan saran dalam penelitian ini. Berikut tabel penelitian yang digunakan untuk penelitian terdahulu :

NO	Judul Penelitian	Penulis	Deskripsi	Jenis penelitian
1	<p>Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, Dan Tan Malaka Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia</p>	<p>H. Agus Dedi</p>	<p>Soekarno mengedepankan konsep gotong royong dan berdikari. Bung Hatta memandang bahwa filosofi dari konsep kebersamaan itu tercermin dalam bentuk koperasi. Tan Malaka sangat</p>	<p>Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif</p>

			<p>mengedepankan konsep materialisme, dialektika, dan logika.</p>	
2	<p>Keadilan Sosial : Telaah atas Filsafat Politik John Rawls</p>	<p><i>Iqbal</i> <i>Hasanuddin</i></p> 	<p>Rawls menjelaskan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan – ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebaga <i>fariness</i> menjadi dasar bagi prinsip – prinsip pengaturan institusi – institusi yang ada di dalamnya.</p>	<p>Penelitian dilakukan menggunakan metode Studi Kepustakaan <i>/Library Research.</i></p>

3	<p>Filsafat Pendidikan Politik Plato Sebagai Cara Untuk Menyiapkan Calon Pemimpin Indonesia</p>	<p>Andika Setiawan</p>	<p>Sasaran utama filsafat Pendidikan politik Plato adalah jiwa, maka program Pendidikan (<i>Paideia</i>) untuk menyiapkan calon pemimpin mengisyaratkan sebuah artifisial (<i>mimesis</i>, imitasi) yang diperoleh lewat <i>mousike</i> dan <i>gymnastike</i> untuk mengarahkan <i>thumos</i>.</p>	<p>Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif berjenis studi literatur</p>
4	<p>Filsafat Materialisme Karl Marx</p>	<p>Irzum Farihah</p>	<p>Menurut filsafat materialisme karl marx bahwa proses kehidupan manusia dari dua</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan / <i>Library Research</i></p>

			<p>faktor yang memiliki hubungan sejarah, jaitu faktor ekonomi sebagai basis dan masalah kesadaran manusia yang berwujud dalam ilmu, filsafat, ideologi dan agama sebagai suprastruktur.</p>	
5	<p>Telaah Pemikiran Politik. Teori Keadilan John Rawls</p>	<p>Muhammad Hafiz Kahfi</p>	<p>Penelitian ini membahas salah satu dari rumusan teori keadilan yang ada yakni teori keadilan John Rawls. John Rawls sendiri menyebut keadilan dengan ungkapan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan</p>

			<p>keadilan adalah kesetaraan (Justice as a Fairness).</p> <p>Melalui ungkapan tersebut, Rawls berpandangan bahwa kebebasan dapat dipadukan dengan kesetaraan dalam sebuah prinsip yang disebut sebagai keadilan.</p>	
6	<p>Filsafat Etika</p> <p>Politik</p> <p>Eksistensialisme</p> <p>Sartean</p>	<p>Novada</p> <p>Purwadi</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang kaidah – kaidah nilai yang muncul dari filsafat etis politis Sartrean yang dapat dipakai sebagai pemecah dilema moralitas dan praksiologi atas tindakan – tindakan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan kritis</p>

			<p>politik. Nilai – nilai yang muncul pemikiran sartrean di antaranya adalah otentisitas, netralitas, kebebasan, kemuliaan, konsekuensialisme, keteraturan, dan intersubyektifitas.</p>	
7	<p>Konsep Kebahagiaan Menurut Aristoteles Dalam Nichomachean Ethics Buku I dan X</p>	<p>Bonaventura Mario</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk memahami makna kebahagiaan menurut Aristoteles dalam tulisannya berjudul Nichomachean Ethics. Makna kebahagiaan menurut Aristoteles ini dicari tahu karena pentingnya</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan / Library Research.</p>

			<p>keberadaan kebahagiaan sebagai tujuan akhir sebagai dasar dari pilihan tindakan – tindakan moral manusia.</p>	
8	<p>Makna Kebahagiaan menurut Aristoteles (Studi Atas Etika Nikomachea)</p>	<p>Mohammad Darwis Al Mundzir</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kebahagiaan seperti apa yang dimaksud oleh Aristoteles sebagai tujuan hidup manusia. Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui riwayat hidup Aristoteles, menjabarkan pandangan Aristoteles tentang etika, dan</p>	<p>Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Library Research</p>

			<p>menjelaskan makna kebahagiaan menurut aristoteles. Hasil dari penelitian ini adalah</p> <p>menjelaskan bahwa kebahagiaan yang dimaksud oleh aristoteles adalah dimana seseorang telah mencapai nikmat / prestasi atau dapat juga dikatakan bahwa seseorang tersebut berprestasi.</p>	
9	<p>Kuasa Negara Dalam Dunia Digital (Studi Kasus Digital Panoptikon Dalam Undang – Undang</p>	<p>Yohanes Wisnu Dharmasesa</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan teori Panoptikon Digital yang dicetuskan oleh Matthew Stein yang di inspirasi oleh Michel Foucault</p>	<p>Penelitian ini sepenuhnya menggunakan Studi Kepustakaan.</p>

	Informasi Dan Transaksi Elektronik Indonesia)		dalam studi kasus Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Indonesia.	
--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu pertama berjudul *Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, Dan Tan Malaka Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sumbangsih pemikiran yang diberikan oleh Soekarno, Hatta, dan Tan Malaka dalam dalam dinamika kehidupan politik di Tanah Air. Soekarno memiliki sumbangsih dalam mengembangkan pemahaman tentang Gotong Royong dan kedaulatan dalam cita rasa nusantara yang ia sebut dengan berdikari. Hatta memiliki sumbangan pemikiran terhadap pemahaman akan ekonomi kekeluargaan dalam bingkai koperasi, sedangkan Tan Malakan memberikan sumbangsih kerangka berpikir yaitu materialisme, dialektika, serta logika yang ingin mengeaskan bahwa perkembangan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan cara – cara berpikir masyarakat.

Penelitian terdahulu kedua berjudul *Keadilan Sosial : Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pandangan John Rawls terkait keadilan dalam bukunya *Theory of Justice*. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa Rawls ber upaya untuk melampaui pandangan utilitarianisme yang mendominasi era - era sebelum rawls serta membangun kembali pemahaman terkait kontrak sosial mulai dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Imanuel Kant

yang selanjutnya digunakan sebagai titik tolak untuk memformulasikan sebuah teori keadilan yang lebih sistematis dan komprehensif.

Penelitian terdahulu ketiga berjudul Filsafat Pendidikan Politik Plato Sebagai Cara untuk Menyiapkan Calon Pemimpin Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari cara supaya dapat mempersiapkan calon – calon pemimpin politik masa depan. Hal ini juga di picu karena dalam rezim demokrasi saat ini, anak didik mengalami kekurangan tokoh panutan yang dapat menjadi teladan dikarenakan banyak pejabat politik yang melakukan tindakan – tindakan korup. Pemahaman terkait model pendidikan politik di ambil dari karya Plato yang berjudul *The Republic* di mana dua elemen penting yang menjadi instrumen pendidikan politik yaitu Pertama : Harmonisasi pendidikan dan permainan dalam proses pembelajaran. Dan Kedua : pengembangan jiwa manusia melalui kegiatan gimnastik, musik, serta dialektika.

Penelitian terdahulu keempat berjudul Filsafat Materialisme Karl Marx. Penelitian ini menganalisa terkait pandangan Marx di mana sistem produksi dan distribusi sangat berperan dalam pengembangan eksistensi manusia. Kehidupan manusia menurut marx memiliki dua faktor yaitu basis yang merupakan aspek ekonomi dan faktor suprastruktur melingkupi hal hal seperti ideologi, agama, dsj....

Penelitian terdahulu ke lima adalah Telaah Pemikiran Politik. Teori Keadilan John Rawls. Penelitian ini menjelaskan bahwa teori keadilan yang di konstruksi oleh John Rawls di dasarkan pada pemahaman akan filsafat keadaan asli / *state of*

nature, kontrak sosial, liberalisme, komunitarian, serta filosofi moral sebagai legitimasi.

Penelitian terdahulu ke enam adalah Filsafat Etika Politik Eksistensialisme Sartrean. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensialisme adalah filsafat yang memiliki kemampuan untuk dijadikan suatu landasan dalam permasalahan etika politik. Hal ini dikarenakan filsafat etika politik eksistensialisme memiliki dasar pada pemahaman atas ontologi manusia serta ontologi faktisitasnya.

Penelitian terdahulu ke tujuh adalah Konsep Kebahagiaan Menurut Aristoteles Dalam *Nicomachean Ethics* Buku I Dan X. Di sini Aristoteles menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan akhir dari manusia adalah pencapaian kebahagiaan. Aktivitas – aktivitas seperti kontemplasi ataupun berfilsafat untuk memahami realitas suatu hal merupakan suatu hal yang penting.

Penelitian terdahulu ke delapan memiliki kemiripan dengan penelitian ke tujuh. Berjudul *Makna Kebahagiaan Menurut Aristoteles (Studi Atas Nikomachea)*

Penelitian terdahulu ke sembilan berjudul *Kuasa Negara Dalam Dunia Digital (Studi Kasus Digital Panoptikon Dalam Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Indonesia)*. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan menggunakan teori panoptik Foucault untuk memahami bagaimana individu mengawasi serta diawasi oleh individu yang lain tanpa harus individu tersebut menyadari realitas tersebut yang pada akhirnya dapat membuat seseorang menghindari untuk melanggar nilai dan norma yang ada pada masyarakat.

2.5 Kerangka Pemikiran

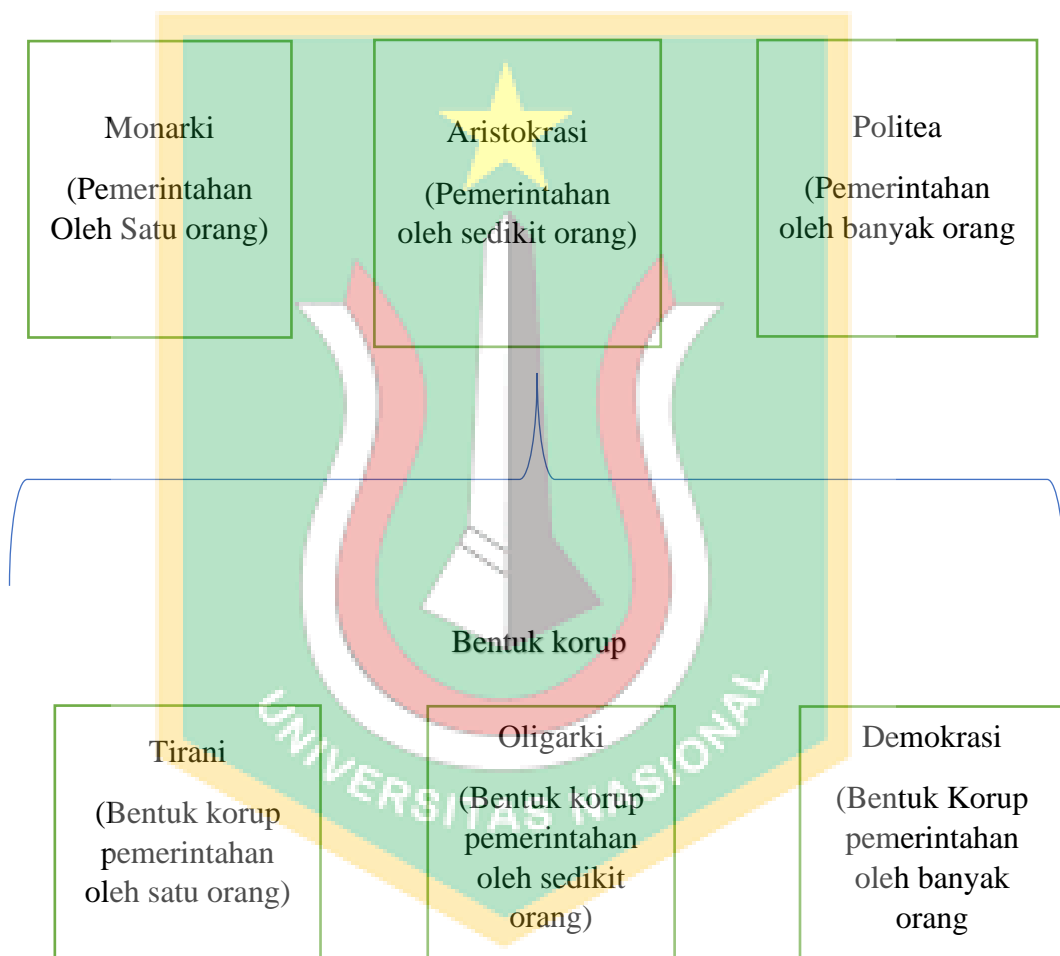
Pemikiran Politik Aristotle

Akan digunakan untuk mengkaji Oligarki dalam penyelenggaraan negara

Aristotle dapat dikatakan merupakan filsuf angkatan terakhir dalam sejarah filosofi Yunani klasik. Hal ini memungkinkan pemahaman yang dia miliki terutama terkait oligarki, dapat dikatakan cukup komprehensif karena dia juga memiliki pengetahuan filosofis filsuf – filsuf sebelumnya. Pemikiran Aristotle juga memiliki keunikan di mana citarasa empirisme lebih ada dibanding filsuf – filsuf sebelumnya. Dengan begitu, untuk kebutuhan analisa ilmu politik terkait oligarki, Aristotle dirasa sebagai pilihan pas untuk digunakan sebagai pisau analisa dalam memahami oligarki secara lebih detail.

Sistem Politik Aristotle yang terkandung dalam Buku *Politika nya*

Bentuk ideal



Dalam hal sistem politik, Aristotle mengklasifikasikan sistem politik menjadi tiga jenis. Hal tersebut di bagi berdasarkan pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang, sedikit orang, dan banyak orang. Bentuk ideal adalah Monarki (Pemerintahan oleh satu orang), aristokrasi (pemerintahan oleh sedikit orang), dan

politeia (pemerintahan oleh banyak orang). Tiga bentuk pemerintahan ini juga dapat mengalami korup menjadi tirani (pemerintahan berdasar satu orang), oligarki (pemerintahan berdasar sedikit orang), dan demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang). Posisi yang diambil aristotle ini lumayan memiliki perbedaan dengan versi pendahulunya yang lebih mengunggulkan model sistem pemerintahan berdasar satu orang sebagai contoh yang ideal, sedangkan aristotle mengambil posisi yang menyatakan bahwa masing – masing bentuk pemerintahan baik oleh satu orang, sedikit orang, dan banyak orang, masing – masing memiliki versi yang baik dan yang buruk.



Sekilas Gambaran Oligarki Menurut Aristoteles

Sesuai dengan skema klasifikasi sistem politik yang dia buat, Aristoteles menempatkan oligarki sebagai salah satu sistem pemerintahan yang korup

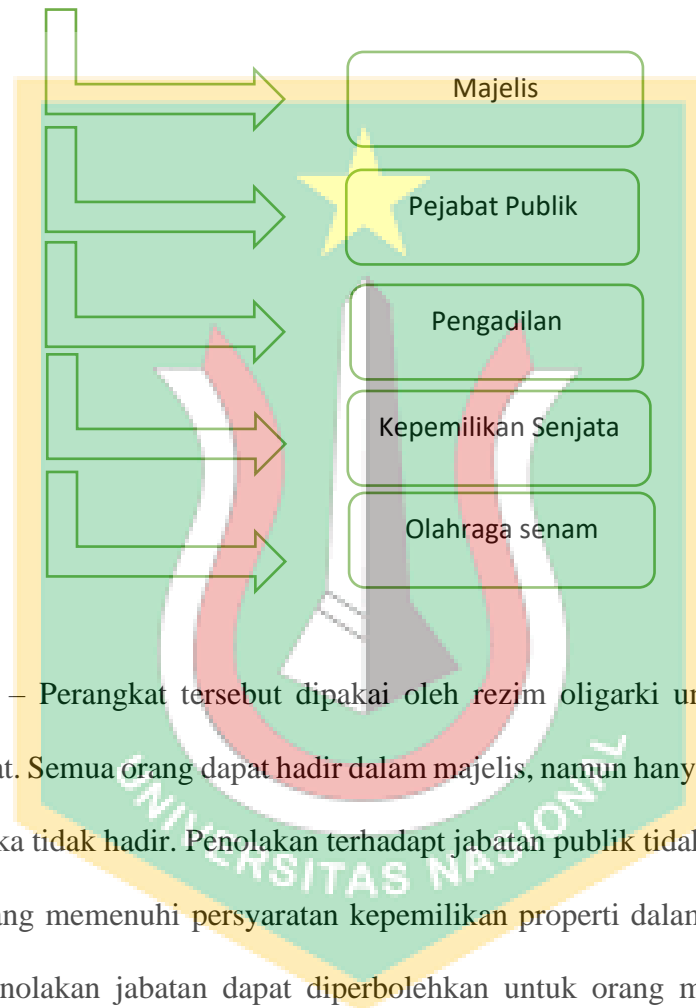
Oligarki di definisikan Aristoteles secara penuh sebagai sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil orang di mana tujuan pemerintahan tersebut adalah untuk keuntungan kelompok kecil tersebut.

Kelompok yang berkuasa tersebut haruslah terdiri dari kelompok kaya. Jika kelompok yang berkuasa bukan orang kaya, menurut aristotle, sistem tersebut tidak bisa disebut sebagai oligarki.

Pendefinisian aristotle terkait oligarki dapat dikatakan cukup sederhana. Dia mendefinisikan oligarki sebagai Pemerintahan oleh sedikit orang di mana kekuasaan politik hanya digunakan untuk keuntungan kelompok kecil tersebut dengan mengorbankan kebaikan bersama masyarakat luas. Penekanan diberikan oleh Aristoteles bahwa syarat agar pemerintahan dapat disebut sebagai oligarki, kelompok kecil yang berkuasa haruslah kelompok kaya, dan bukan kelompok miskin.

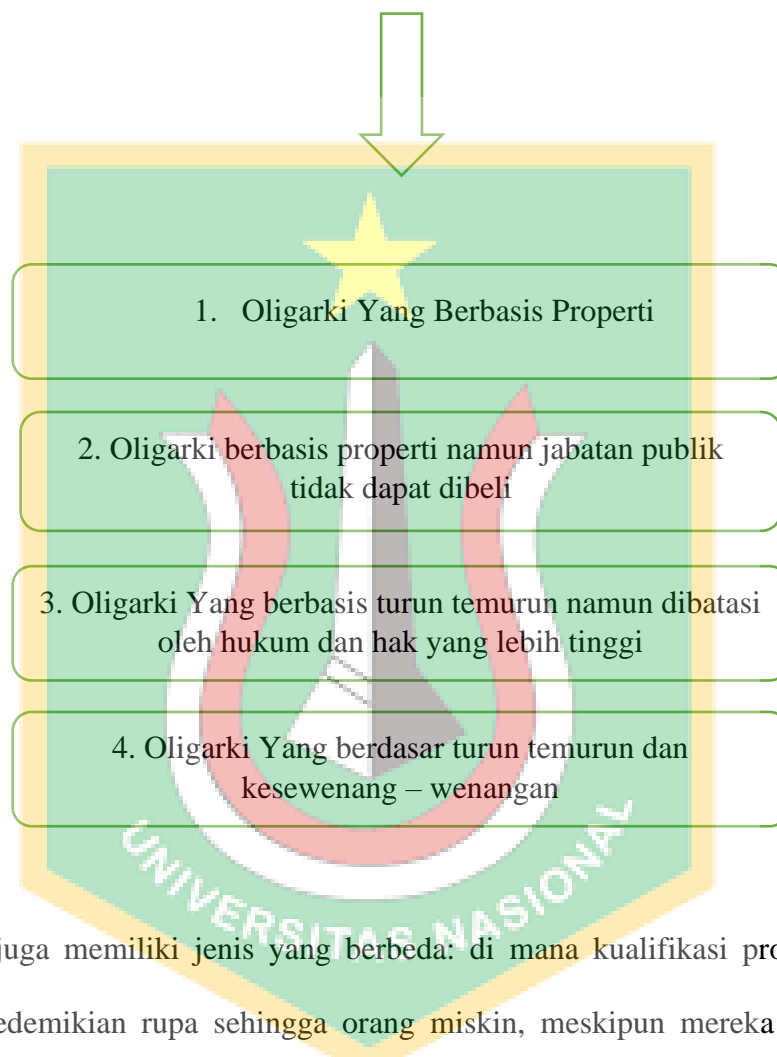


Perangkat yang digunakan oleh oligarki untuk mengelabui rakyat ada lima



Perangkat – Perangkat tersebut dipakai oleh rezim oligarki untuk mengelabui masyarakat. Semua orang dapat hadir dalam majelis, namun hanya orang kaya yang didenda jika tidak hadir. Penolakan terhadap jabatan publik tidak bisa ditolak oleh mereka yang memenuhi persyaratan kepemilikan properti dalam jumlah tertentu, namun penolakan jabatan dapat diperbolehkan untuk orang miskin. Pemberian denda juga hanya dikenakan pada orang kaya yang tidak menghadiri pengadilan. Terkait dengan kepemilikan senjata dan olah raga senam, orang kaya di denda jika tidak memiliki senjata dan tidak hadir dalam gedung olah raga untuk aktivitas olah raga senam(*gymnastic*).

Secara umum ada 4 variasi model oligarki



Oligarki juga memiliki jenis yang berbeda: di mana kualifikasi properti untuk jabatan sedemikian rupa sehingga orang miskin, meskipun mereka merupakan mayoritas, tidak memiliki bagian dalam pemerintahan, namun dia yang memperoleh kualifikasi dapat memperoleh bagian. Jenis lain adalah ketika ada kualifikasi untuk jabatan, tetapi tinggi, dan lowongan di badan pemerintahan dipecah oleh kooptasi. Jika pemilihan dilakukan dari semua orang yang memenuhi syarat, konstitusi semacam ini condong ke aristokrasi, jika dari kelas istimewa, ke oligarki. Jenis oligarki lainnya adalah ketika anak laki-laki menggantikan ayah. Ada

bentuk keempat, juga turun-temurun, di mana hakim adalah yang tertinggi dan bukan hukum. Di antara oligarki inilah tirani di antara monarki, dan bentuk demokrasi yang disebutkan terakhir di antara demokrasi; dan pada kenyataannya oligarki semacam ini menerima nama sebuah dinasti (atau pemerintahan keluarga yang kuat).

